



## *Gouvernements Burgerlijke Zienkenrichting Te Pandeglang 1914-1925*

Moch Alfath Nurussalam<sup>1</sup>, Usmaedi<sup>2</sup>

*Pendidikan Sejarah/ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Rangkasbitung, Indonesia.*

### **RIWAYAT ARTIKEL**

*Sejarah artikel:*  
Diterima 13 Agustus 2025  
Diterima dalam bentuk  
revisi 27 September 2025  
Publish 01 Juli 2026

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas nilai historis, arsitektural, dan sosial Gedung eks RSUD Pandeglang yang saat ini difungsikan sebagai Perpustakaan Daerah. Dibangun pada tahun 1914 pada masa kolonial Hindia Belanda, gedung ini merupakan rumah sakit sipil pertama di Kabupaten Pandeglang, sebagai bagian dari implementasi kebijakan Politik Etis di bidang kesehatan. Sebagai institusi medis kolonial, rumah sakit ini tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap masyarakat lokal. Pendirian rumah sakit menghadapi resistensi budaya akibat kuatnya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, yang kemudian mulai bergeser pasca keberhasilan rumah sakit dalam menangani wabah *Frambousia Tropica* pada 1920-an. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, melalui studi arsip dan wawancara dengan akademisi sejarah lokal. Dari segi arsitektur, bangunan ini mencerminkan gaya kolonial tropis dengan elemen seperti *portico*, jendela jalusi, *dormer window*, serta penggunaan material kayu jati yang adaptif terhadap iklim. Hasil penelitian menegaskan bahwa gedung ini merupakan warisan sejarah yang layak dilestarikan, tidak hanya sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga sebagai simbol evolusi sistem kesehatan dan transformasi budaya masyarakat Pandeglang.

*Kata kunci:*

*RSUD Pandeglang,  
Frambousia tropica, kolonial  
belanda, politik etis*

### **PENDAHULUAN**

Pada permulaan abad XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya, Politik Etis berakar baik pada masalah kemanusiaan maupun pada keuntungan ekonomi, kecaman-kecaman terhadap pemerintahan Belanda yang di lontarkan dalam novel Max Havellar (1886) dan pengungkapan lainnya mulai membuah hasil. Semakin banyak suara Belanda yang

<sup>1</sup> [muhamaddalfath11@gmail.com](mailto:muhamaddalfath11@gmail.com)

mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas (Rickfless, 1989).

Tahun 1900 Munculnya kaum Ethis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran *De Locomotief*) dan C. Van Deventer (politikus) ternyata membuka mata Pemerintah Kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib pribumi yang kehidupannya terbelakang. Politik Etis atau Politik Balas Budi merupakan suatu pemikiran yang memberikan pernyataan bahwa Pemerintah Kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi (Usmaedi, 2017). Dampak politik etis terhadap bidang ekonomi dan sosial telah dilakukan oleh banyak pihak baik di dalam negeri maupun internasional, namun tidak banyak pihak yang menentang di bidang kesehatan Masyarakat.

Sejarah pelayanan kesehatan di Hindia Belanda merupakan bagian penting dari perkembangan kebijakan kolonial yang mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Politik Etis (*Ethische Politiek*) pada awal abad ke-20. Politik Etis yang diperkenalkan pada tahun 1901 menempatkan pendidikan, irigasi, dan emigrasi sebagai program utama, namun dalam implementasinya pemerintah kolonial juga mulai memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan masyarakat. Perhatian tersebut dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan politik kolonial, yakni menjaga produktivitas tenaga kerja serta mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan aktivitas ekonomi di wilayah jajahan (Boomgaard, 1993; Pols, 2019).

Dalam konteks tersebut, pemerintah Hindia Belanda membangun berbagai rumah sakit sipil pemerintah atau *Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting* (GBZ) di berbagai daerah di Jawa maupun luar Jawa. GBZ merupakan rumah sakit pemerintah yang berada di bawah pengawasan *Burgerlijke Geneeskundige Dienst* (BGD) atau Dinas Kesehatan Sipil. Keberadaan rumah sakit ini menjadi instrumen penting dalam implementasi kebijakan kesehatan kolonial karena berfungsi tidak hanya sebagai fasilitas pengobatan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan kesehatan masyarakat, pengendalian epidemi, dan representasi kekuasaan negara kolonial di tingkat lokal. Sejak 1906 pemerintah kolonial mulai melakukan standarisasi terhadap rumah sakit-rumah sakit pemerintah melalui pemberian subsidi, pengaturan tenaga medis, pembangunan gedung permanen, serta penetapan standar pelayanan kesehatan.

Di wilayah Keresidenan Banten, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah yang memperoleh perhatian dalam pembangunan infrastruktur kesehatan. Pada awal abad ke-20 kondisi kesehatan masyarakat Pandeglang masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain tingginya angka penyakit endemis seperti malaria, disentri, tuberkulosis, serta buruknya sanitasi lingkungan. Tingginya angka kesakitan tersebut mendorong pemerintah kolonial untuk merencanakan pembangunan rumah sakit pemerintah di Pandeglang pada tahun 1914. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa Pandeglang dipandang sebagai wilayah yang membutuhkan fasilitas kesehatan permanen untuk melayani penduduk sekaligus mendukung administrasi kolonial di wilayah Banten Selatan.

Pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20, terutama untuk pelayanan kuratif sangat diskriminatif. Hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Oleh karena itu ketika politik etis digulirkan pada masa ini salah satu poin yang mendapatkan perhatian adalah mengenai pelayanan kesehatan.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Dengan dasar pemikiran itu kemudian muncullah kebijakan subsidi kesehatan yang pada dekade 1910 -1920 berorientasi kepada perluasan pelayanan kesehatan kuratif dengan mendirikan banyak rumah sakit baik di Jawa maupun di luar Jawa, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta (Kurniarini, 2015). Sebagai bagian dari wilayah Banten, memiliki sejarah panjang terkait dengan pemerintahan kolonial Belanda termasuk dalam bidang Kesehatan, kemudian ditemukan di wilayah Pandeglang yaitu Eks Gedung RSUD Pandeglang yang sekarang digunakan sebagai Perpustakaan Daerah Pandeglang. Gedung atau bangunan tersebut tidak bisa terlepas dari adanya sejarah yang mengirinya. Aspek aspek yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana kebijakan kolonial mempengaruhi kehidupan masyarakat Pandeglang dalam segi pelayanan rumah sakit.

Pembangunan *Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting te Pandeglang* berlangsung selama masa Perang Dunia I dan baru selesai sekitar tahun 1919. Rumah sakit tersebut dibangun dengan fasilitas yang relatif lengkap untuk ukuran kota kabupaten pada masa itu, meliputi bangunan utama, ruang rawat laki-laki dan perempuan, paviliun khusus bagi orang Eropa, paviliun bagi kalangan bangsawan pribumi, ruang isolasi penyakit menular, ruang perawatan gangguan jiwa, kamar jenazah, fasilitas pencucian, gereja, serta koridor penghubung antargedung. Tata ruang tersebut mencerminkan karakter pelayanan kesehatan kolonial yang masih menerapkan sistem segregasi sosial berdasarkan ras, status sosial, dan jenis penyakit.

Meskipun bangunan rumah sakit telah selesai dibangun pada tahun 1919, operasionalnya belum berjalan secara optimal. Pada awal pembukaannya rumah sakit belum memiliki dokter tetap sehingga pengelolaan pelayanan medis masih dipimpin oleh seorang kepala perawat berkebangsaan Eropa. Selain itu, berbagai fasilitas dasar seperti jaringan air bersih dan penerangan listrik belum tersedia secara memadai sehingga pelayanan kesehatan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fisik belum diikuti dengan kesiapan administratif maupun penyediaan sumber daya kesehatan yang memadai. Baru pada tahun 1925 rumah sakit mulai mengalami perubahan penting setelah tersedianya jaringan air bersih, listrik, serta penempatan dokter pemerintah sebagai penanggung jawab pelayanan medis. Periode ini menandai dimulainya operasional rumah sakit secara lebih efektif sebagai institusi kesehatan kolonial di Pandeglang.

Kajian mengenai *Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting te Pandeglang* periode 1914–1925 masih relatif terbatas dibandingkan penelitian mengenai kebijakan kesehatan kolonial di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas dinamika pelayanan kesehatan kolonial secara umum atau menyoroti perkembangan Rumah Sakit Pandeglang setelah tahun 1925. Akibatnya, fase awal perencanaan, pembangunan, hingga proses transisi operasional rumah sakit belum memperoleh perhatian yang memadai dalam historiografi kesehatan Indonesia. Padahal periode tersebut merupakan fase penting yang menunjukkan bagaimana kebijakan kesehatan kolonial diterjemahkan ke dalam pembangunan institusi kesehatan di tingkat lokal.

Kajian mengenai *Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting te Pandeglang* periode 1914–1925 masih relatif terbatas dibandingkan penelitian mengenai kebijakan kesehatan kolonial di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas dinamika pelayanan kesehatan kolonial secara umum atau menyoroti perkembangan Rumah Sakit Pandeglang setelah tahun 1925. Akibatnya, fase awal perencanaan, pembangunan, hingga proses transisi operasional rumah sakit belum memperoleh perhatian yang memadai dalam historiografi kesehatan Indonesia. Padahal periode tersebut merupakan fase penting yang menunjukkan bagaimana kebijakan kesehatan kolonial diterjemahkan ke dalam pembangunan institusi kesehatan di tingkat lokal.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Sejarah. (Gotchalk:1983:32 dalam Abdurrahman) mengartikan metode penelitian sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat di percaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah Sejarah yang dapat di percaya. Penelitian ini menggunakan metode Historis karena permasalahan yang di angkat adalah permasalahan Sejarah khususnya mengenai peranan Rumah Sakit lama Pandeglang pada masa kolonial pada tahun 1914-1925.

(Gotchalk:1983:32) Mengungkapkan empat Langkah penelitian yang harus di lakukan dalam melakukan penelitian sejarah itu.

1. Mengumpulkan Objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan bahan tertulis dan lisan yang relevan.
2. Menyingkirkan bahan bahan (atau bagian bagian daripadanya) yang tidak otentik.
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan bahan yang otentik.
4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Dari keempat langkah tersebut, tahapan memilih topik, menyusun semua bukti bukti Sejarah dan membuat catatan termasuk pada tahapan *Heuristik*, sedangkan mengevaluasi semua bukti bukti sejarah termasuk tahap kritik dan terakhir Menyusun hasil penelitian serta mengkajinya termasuk tahap *Historiografi*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Eks Gedung RSUD Pandeglang yang ber alamat di Jl. KH, Jl. KH. Abdul Halim No.3, Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Bangunan Eks Rumah Sakit Lama Pandeglang saat ini di gunakan menjadi Bangunan Perpustakaan daerah Pandeglang, bangunan ini merupakan salah satu institusi kesehatan yang memiliki nilai sejarah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebagai rumah sakit pertama di daerah Pandeglang, institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai saksi bisu dari perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Pandeglang.

Eks Gedung RSUD Pandeglang dapat dianggap sebagai salah satu hasil nyata dari kebijakan Politik Etis di bidang kesehatan. Pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari infrastruktur sosial yang dibangun sebagai wujud tanggung jawab etis pemerintah kolonial, meskipun sering kali dibarengi dengan kepentingan politis. Meskipun pembangunan rumah sakit tidak secara eksplisit disebutkan dalam tiga pilar utama tersebut, sektor kesehatan menjadi bagian dari implementasi luas Politik Etis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gedung Eks RSUD Pandeglang merupakan bangunan lama pada zaman Kolonial Belanda yang saat ini masih ada dan saat ini beroperasi menjadi Perpustakaan Daerah Kabupaten Pandeglang juga ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya yang mana telah diresmikan oleh BPK WIL VIII Banten. Gedung Eks RSUD Pandeglang digunakan sebagai Rumah sakit Kabupaten Pandeglang tempo dulu.

Dalam proses pendirian Gedung Eks RSUD Pandeglang, pemerintah kolonial menghadapi berbagai tantangan sosial, salah satunya adalah resistensi dari sebagian masyarakat lokal. Penolakan ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap pembangunan fisik rumah sakit, tetapi lebih dilatarbelakangi oleh sistem kepercayaan yang telah mengakar kuat di kalangan masyarakat Pandeglang saat itu. Penelusuran terhadap arsip-arsip kolonial dan sumber sekunder yang kredibel menunjukkan bahwa tahun 1918-1919 merupakan periode awal di mana rumah sakit-rumah sakit distrik mulai dibangun secara sistematis oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Politik Etis. Pembangunan RSUD Pandeglang pada tahun tersebut sejalan dengan program perluasan fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat pribumi, sebagai bentuk dari "balas budi" pemerintah kolonial terhadap eksploitasi panjang yang dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, RSUD Pandeglang termasuk dalam inisiatif awal untuk memperluas akses layanan kesehatan ke daerah-daerah luar pusat kolonial.

Dalam Koran *Bataviaasch Nieuwsblad* No 14, 17 Desember tahun 1912 yang ber isi kunjungan gubernur jenderal Hindia Belanda ke Banten, atau *De Gouverneur Generaal in Bantam*. Regent Pandeglang meminta izin untuk membangun sebuah rumah sakit di Pandeglang dan pada saat itu Regent Pandeglang memperoleh izin dari Gubernur Jenderal untuk membangun sebuah rumah sakit di Pandeglang. Pendirian rumah sakit ini berawal dari kebutuhan akan layanan kesehatan bagi masyarakat sipil pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kolonial mulai mempersiapkan infrastruktur medis di wilayah Banten. Upaya ini terealisasi secara formal pada tahun 1914.

Ditandai dengan lembaran perancangan *Verzamelen van materialen voor bouw ziekeninrichting* Pandeglang (Pengumpulan material konstruksi pembangunan rumah sakit sipil pemerintah pandeglang) 1914, lembaran yang dikeluarkan oleh *Verslaag Burgerlijke Openbare Werken* yang mengatur irigasi, mengatur hal-hal lain termasuk kesehatan, kesehatan yang dimaksud adalah seperti rumah sakit. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap, karena material material nya berasal dari luar atau biasa disebut barang ekspor.

Dengan demikian, resistensi masyarakat terhadap pembangunan RSUD Pandeglang pada masa awal bukan semata-mata persoalan medis, melainkan mencerminkan benturan antara sistem kepercayaan tradisional dan pendekatan ilmiah Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Penolakan tersebut menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks, di mana modernisasi menghadapi tantangan ketika bersinggungan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual lokal.

Namun seiring waktu, persepsi masyarakat mulai berubah, terutama setelah keberhasilan rumah sakit dalam menangani wabah *Frambousia tropica* sebuah penyakit menular kulit yang saat itu banyak menjangkiti penduduk. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata efektivitas pengobatan modern dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Dengan capaian tersebut, RSUD Pandeglang tidak hanya menjadi simbol pelayanan kesehatan kolonial, tetapi juga tonggak penting dalam pergeseran pola pikir masyarakat terhadap kesehatan dan pengobatan ilmiah.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang di lakukan , dapat di peroleh kesimpulan bahwa sebagai berikut ini, Penelitian ini mengungkapkan bahwa *Gouvernements Burgerlijke ziekenrichting Te Pandeglang* atau Eks Gedung RSUD Pandeglang memiliki nilai historis, arsitektural, dan sosial yang sangat penting dalam perkembangan sistem kesehatan dan budaya masyarakat Pandeglang. Gedung ini awalnya merupakan rumah sakit sipil yang didirikan pada masa kolonial Belanda, sebagai bagian dari pelaksanaan Politik Etis di bidang kesehatan. Pendirian rumah sakit ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan bagian dari infrastruktur kolonial yang mulai didirikan pada tahun 1914.

Secara arsitektural, bangunan ini mencerminkan gaya kolonial yang adaptif terhadap iklim tropis Indonesia, dengan elemen-elemen seperti portico, jalusi, kanopi, dan dormer window yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Estetika dan fungsionalitas bangunan menunjukkan pendekatan desain yang matang dari pemerintah kolonial.

Dari sisi sosial, RSUD Lama Pandeglang memainkan peran besar dalam perubahan pola pikir masyarakat lokal terhadap kesehatan. Awalnya menghadapi resistensi karena kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dan dukun, namun keberhasilan rumah sakit dalam menangani wabah *Frambousia tropica* di tahun 1920-an menjadi titik balik yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan modern.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang atas izin akses terhadap dokumen dan informasi terkait sejarah

gedung eks RSUD Pandeglang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para akademisi dan sejarawan lokal yang telah bersedia memberikan wawasan melalui wawancara, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini.

## REFERENSI

### Sumber Buku

- Abdurrahman, D. *Metode Penelitian Sejarah*. Jogjakarta Ar-Ruzz Media (2007).
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Dewi Puspito Rini, Rico Fajrian, Yanuar Mandiri, Adita Nofiandi (2019). *Database Cagar Budaya dan objek diduga Cagar Budaya*. Serang: Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten.
- Fadillah, Moh Ali and Utama, Darwis Wijaya and Juliadi, Juliadi and Nofiandi, Adita and Auliya, Annisa Farrihatul (2021) *Lada: atribut utama jalur rempah Banten*. BPCB Provinsi Banten, Serang, pp. 1-97.
- Kusumawati, I., Lestari, N. C., Sihombing, C., Purnawanti, F., Soemarsono, D. W. P., Kamadi, L., ... & Hanafi, S. (2023). *Pengantar Pendidikan*. CV Rey Media Grafika.
- Pols, H. (2019). *Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern (1200-2004)*. Jakarta: Serambi Alam Semesta.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Peneliian*. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Sunandar, M. N., Atsani, N. F., Septiani, N., & Syaifanattuzzaharo, S. (2022). *Gedung Eks RSUD Pandeglang dalam Perspektif Sejarah: Fungsi Dahulu dan Sekarang*.
- Thieme, W. C. (1920). *Memorie van Overgave van de Residentie Bantam*. (Arsip Kolonial Belanda).
- Bedding, J. C. (1925). *Memorie van Overgave van de Residentie Bantam*. (Arsip Kolonial Belanda).
- Landsdrukkerij. (1919). *Koloniaal Verslag Nederlandsch-Indië* (laporan pembangunan fasilitas pemerintah).

### Sumber Jurnal

- Boomgaard, P. (1986). III. *The welfare services in Indonesia, 1900–1942*. *Itinerario*, 10(1), 57-82.
- Boomgaard, P. (1993). *The Development of Colonial Health Care in Java: An Exploratory Introduction*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 149(1), 77–93.
- Emalia, I. (2023). *Kesehatan dan Lingkungan dalam Perspektif Sejarah: Perkembangan Baru Historiografi Indonesia*. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 6(2), 105-120.
- Febrianti, D., Fauzan, R., & Prasadana, M. A. F. (2026). *Dynamics of the Management and Implementation of Colonial Health Policy at Pandeglang Hospital (1925–1935)*. *Yupa: Historical Studies Journal*, 10(1), 77–86.
- Galih, D. R. (2017). *Penerapan politik etis di surabaya tahun 1911-1930*. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 751-765.

- Kurniarini, D. D., Darini, R., & Dewi, I. M. (2015). *Pelayanan dan sarana kesehatan di Jawa abad XX*. *Mozaik*, 7(1), 1-15.
- Peter Boomgaard, "Upliftment down the drain? Effect of Welfare Measures in Late Colonial Indonesia", dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken and Mario Rutten (ed.) *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under the New Order*, (Leiden: KITLV Press, 1993), hlm. 253.
- Usmaedi, U. (2017). *Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi Untuk Pangreh Praja (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren-Osvia) Di Serang–Banten Tahun 1900–1927*. *Diakronika*, 17(1), 17-31.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)*. *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1-10.